

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika .....	11
<b>BAB II    KERANGKA TEORI</b>	
A. Alat bukti petunjuk dalam KUHAP .....	15
B. Alat bukti petunjuk dalam pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang no. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-	

Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Alat bukti surat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dengan surat yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi .....	29
D. Penyadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat memberikan tercapainya batas minimum pembuktian .....	31

BAB III LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA PENYADAPAN  
SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM  
KETENTUAN PASAL 26A UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KORUPSI DAN KEWENANGAN PENYADAPAN  
SEBAGAIMANA DITENTUKAN PASAL 12 HURUF A  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Latar belakang diterbitkannya pasal 26A Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomad 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi .....	33
B. Pendapat DPR RI terkait dengan kewenangan melakukan penyadapan.....	35
C. Latar belakang diterbitkannya kewenangan penyadapan dari pendapat Pemerintah .....	37

D. Kewenangan melakukan penyadapan dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 .....	41
E. Hak atas Privasi dan pembatasan menurut hukum hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan .....	45

BAB IV PENERAPAN HASIL DARI PENYADAPAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PK NOMOR 161 PK/PD.SUS/2010)

A. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Al Amin Nur Nasution, S.E. ....	51
B. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh M. Al Amin Nur Nasution, S.E dalam dakwaan Primair .....	59
C. Pelaturan perundang-undangan yang dilanggar oleh M. Al Amin Nur Nasution, S.E dalam dakwaan Subsidair .....	63
D. Penerapan hasil penyadapan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 26A Undang-Undang Korupsi ...	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA